

SKRIPSI



IMPLEMENTASI HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA SUNGGUMINASA

OLEH :

MUHAMMAD FARID AULIA

B 111 10 410

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN
DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA SUNGGUMINASA**

Disusun dan Diajukan Oleh

MUHAMMAD FARID AULIA

B 111 10 410

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SUNGGUMINASA

Disusun dan diajukan oleh

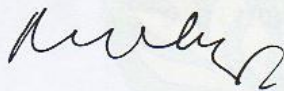
MUHAMMAD FARID AULIA

B11110410

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 6 Maret 2015
Dan Dinyatakan Diterima

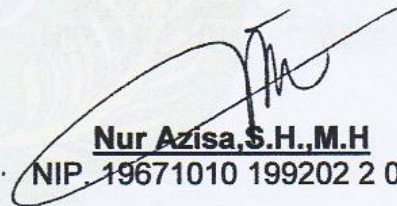
Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 19671010 199202 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD FARID AULIA

NIM : B 111 10 410

Bagian : HUKUM PIDANA

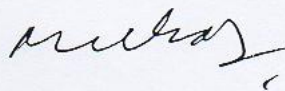
Judul : IMPLEMENTASI HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SUNGGUMINASA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Januari 2015

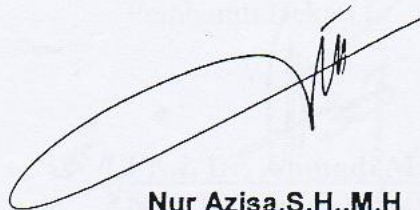
Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. A. Muhadar, S.H., M.H
NIP. 195701011986011001

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 196710101992022002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD FARID AULIA**

No. Pokok : B111 10 410

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa


Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 2 Maret 2015

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I

 **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.**

NIP. 19610607 198601 1 003 

ABSTRAK

MUHAMMAD FARID AULIA (B111 10 410), Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa, dibimbing oleh Bapak Muhadar sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azisa sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, maupun hambatan yang dihadapi pihak lapas dalam memberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan khususnya pasal 14 memberikan pengakuan yang tegas tentang hak – hak narapidana, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa belum berjalan baik karena berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Lapas, kendala - kendala tersebut antara lain adalah over capacity yang terjadi di Lapas, masih kurangnya petugas yang ada di Lapas Sungguminasa dan juga pihak Lapas masih terkendala masalah anggaran dana yang terbatas. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai kendala yang dihadapi pihak lapas tersebut adalah tidak terpenuhinya kebutuhan gizi harian para narapidana karena kurang baiknya proses pengelolaan makanan di dapur Lapas Sungguminasa dan perawatan oleh petugas kesehatan kepada para WBP yang sedang menderita penyakit belum dilakukan dengan baik karena fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta obat – obatan yang ada di klinik belum memadai untuk menunjang kesehatan para narapidana di Lapas Sungguminasa.

Berdasarkan berbagai macam hambatan dan permasalahan yang ada maka penulis beranggapan bahwa pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa belum dilaksanakan dengan baik.

ABSTRACT

MUHAMMAD FARID AULIA (B111 10 410), Implementation of Right to Health Care and Food Eligible For Narcotics Penitentiary Inmates In Class IIA Sungguminasa, led by Mr. Muhadar as first counselor and Ms. Nur Azisa as mentors II.

This study aims to determine the fulfillment of the rights of prisoners in the health services and the food was decent, and the obstacles faced by the prisons in providing health care and decent food in Class IIA Narcotics Penitentiary Sungguminasa.

Regulation number 12 of 1995 concerning correctional particularly Article 14 provides explicit recognition the rights of prisoners, one of which is the right to health care and decent food, from the research it can be concluded that the realization of the right of prisoners to obtain health services and decent food in Class IIA Narcotics Penitentiary Sungguminasa not going well because of various constraints faced by the prison, constraints - the constraints among others, is over capacity that occurs in prisons, there is still a lack of officers in prisons Sungguminasa and also the prisons is still constrained issue a limited budget. The impact of the various constraints faced by the prison is not the fulfillment of the daily nutritional needs of prisoners due to lack of good food in the kitchen pengolahan process Sungguminasa prisons and treatment by health workers to the prisoners who were suffering from the disease have not done well because of health facilities or equipment and their medical drugs - drugs that exist in the clinic is not sufficient to support the health of the inmates in prisons Sungguminasa.

Based on a wide variety of obstacles and problems that exist, the authors assume that the realization of the right of prisoners to obtain health care and decent food in Penitentiary Class IIA Sungguminasa not going well.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, dimana berkat limpahan rahmat, kerunia serta hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, dan merupakan suatu kebanggaan yang dirasakan atas berbagai macam kendala yang sudah dilewati dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karenanya, saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak dari tentunya akan sangat membantu dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Dengan segala kekurangan, kerendahan hati dan rasa hormat yang sangat tinggi, penulis haturkan banyak rasa terima kasih dan rasa cinta yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Ir. H. SUPERMANTO TIBE** dan ibunda **Hj. FARIDA ARYANI** atas kesabaran yang tiada akhir, terima kasih atas cinta dan

kasih sayang yang diberikan, terima kasih atas kepercayaan yang selama ini diberikan, dan terima kasih atas segala pengorbanan yang dilakukan kepada penulis selama ini. Serta kepada kedua saudara penulis **Rezha Archita Nugraha, ST.** dan **Muhammad Fidyen Yulfizar, ST.** atas dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Serta keluarga besar penulis yang selalu membantu dan berdoa yang terbaik untuk penulis.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan dari bapak **Prof. Dr. Muhadar, SH, MS.** selaku pembimbing I skripsi dan Ibu **Hj. Nur Azisa, SH, MH.** selaku pembimbing II skripsi, penulis ucapkan banyak terima kasih karena selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi arahan dan bimbingan dengan sabar, terima kasih atas saran beserta kritik yang telah diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini dan terima kasih atas nasihat dan dukungan yang telah membangun rasa optimisme kepada penulis.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M,A.** selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, SH, M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH, MH,** Bapak **Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH, MH.** Dan Ibu **Hj. Haeranah, SH, MH.,** selaku penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
4. Bapak **Prof. Dr. Irwansyah, SH, MH.** Selaku Penasihat Akademik penulis.
5. Para dosen/pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa yang telah menerima penulis dengan senang hati untuk melakukan penelitian.
8. Para teman – teman penulis : Ilue, Abdi, Putra, Hasrul, Alif, Aksa, Randi, Adit, Wildan, Aan, Fadel, Oddang, Indra, Dana, Wandu, Furqan, Wahyu dan lain-lain yang belum disebutkan satu persatu terimakasih atas perjuangan dan kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

9. Anggota UKM Sepakbola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

10. Teman – teman Legitimasi 2010 Fakultas Hukum universitas Hasanuddin.

11. Para Sahabat – sahabat PDRKZ crew atas kebersamaan, keceriaan yang penulis lalui bersama kalian.

Dan seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir Kata,

Makassar, Maret 2015

Muhammad Farid Aulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana.....	7
1. Pembinaan tahap awal	10
2. Pembinaan tahap lanjutan	10
3. Pembinaan tahap akhir.....	11
B. Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan	13
1. Lembaga Pemasyarakatan	13
2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan.....	15
C. Hak- Hak Narapidana	18
D. Makanan.....	22
1. Pengetian Makanan.....	22
E. Mekanisme Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan	24
1. Perencanaan Anggaran.....	24
2. Perencanaan Menu	24
	xi

3. Pehitungan Kebutuhan Bahan Makanan	25
4. Pengadaan Bahan Makanan	25
5. Penerimaan, Pemesanan, dan Penyimpanan Bahan Makanan	25
6. Persiapan, Pengolahan Bahan Makanan dan Pendistribusian	25
7. Pencatatan dan Pelaporan	26
8. Monitoring dan Evaluasi	27
F. Pelayanan Kesehatan.....	27
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan	27
2. Pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.....	28
3. Konsepsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Narapidana.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Lokasi Penelitian.....	32
B. Jenis Dan Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa.....	35
B. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Lapas Klas II A Sungguminasa	38
1. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa	39
2. Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang	

Layak Bagi Narapidana Lapas Klas II A Sungguminasa.....	48
C. Kendala yang Dihadapi Pihak Lapas Dalam Melakukan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa.....	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan dalam menanggulangi masalah kejahatan.¹

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku

¹Dwidja Priyatno, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 2.

kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut pemahaman untuk memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan, sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Merujuk terhadap konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.²

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan

²Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan .

pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Meskipun demikian penerapan sanksi pidana haruslah mengutamakan Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Sering dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan bahwa hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana sendiri. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga merupakan sesuatu yang perlu bagi negara hukum untuk menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi. Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak-hak dari narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan

makanan yang layak.pelayanan kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan higienis, bergizi dan berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan.Makanan yang bergizi adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga cara memasak makanan, suhu makanan pada saat disajikan, dan bahan.

Sedangkan untuk Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembenaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati yang menjunjung tinggi.

Dalam konsepnya bahwa sistem Pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan Narapidana dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat, bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal maka dari itu menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan

hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal, berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan demikian pula bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lapas.

Pelayanan kesehatan yang di berikan di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia dari negara kepada warganya. Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dibidang kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, untuk terwujudnya Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan.³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkajitentang **Pemenuhan Hak Mendapatkan PelayananKesehatan dan Makanan yang Layakbagi Narapidanadi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bolangi Sungguminasa.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga PemasyarakatanSungguminasa?

³<http://adtyadijavanet.blogspot.com/2013/11/elaksanaan-pelayanan-kesehatan.html> diakses pada tanggal 16 mei 2014.

2. Faktor – faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan konstribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bolangi Sungguminasa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana.

Di dalam PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa:

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan.

Selama di LAPAS, Warga Binaan Perasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Perasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat

Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem permasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:⁴

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila

⁴David Zulkarnanen, *Pengembangan diri. Makalah Etika Profesi*. (Bogor: Yayasan Pendidikan Mandiri Bogor Educare, 2009).

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem permasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12/95, dinyatakan bahwa:

Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan.

Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan di LAPAS dilaksanakan:

- a. Secara intramural (di dalam LAPAS); dan
- b. Secara ekstemural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi.

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31/99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan :⁵

⁵ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta:PT.Gramedia), hal 192-193

a) Pembinaan tahap awal

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- (1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- (3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- (4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk di daftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b) Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- (1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;

- (2) Pelaksanaan program binaan lanjutan;
- (3) Penilaian pelaksanaan program binaan lanjutan; dan
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c).Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- (1) Perencanaan program integrasi;
- (2) Pelaksanaan program integritasi; dan
- (3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Tahap Integrasi atau non institusional, tahap ini apabila narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 9 (sembilan) bulan, narapidana dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat. Di sini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat dan keluarga.

Setelah pembebasan bersyarat habis, kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk mengurus atau menyelesaikan surat bebas atau surat lepasnya. Apabila dalam tahap ini mendapatkan kesulitan atau hal-hal yang memungkinkan tidak mendapatkan persyaratan pembebasan bersyarat, maka narapidana diberikan cuti panjang lepas yang lamanya sama dengan banyaknya remisi terakhir, tapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan. Dengan uraian di atas, tampak jelas bahwa

proses pemasyarakatan berjalan tahap demi tahap, dan masing-masing tahap ada gerak ke arah menuju kematangan.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir nerapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain:

- a. Dana pembinaan;
- b. Perlengkapan ibadah;
- c. Perlengkapan pendidikan;
- d. Perlengkapan bengkel kerja;
- e. Perlengkapan olahraga dan kesenian.

Selain sarana dan prasarana, LAPAS yang digunakan untuk pelaksanaan program pembinaan dibagi dalam berbagai klarifikasi dan spesifikasi. Yang di maksud dengan “klarifikasi LAPAS” adalah pembagian LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja dan lokasi. Yang dimaksud dengan “spesifikasi LAPAS” adalah pembagian jenis LAPAS dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan dan keamanan.

Pentahapan pembinaan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Permasyarakatan. Dalam sidang ini Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil Litmas. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Permasyarakatan berdasarkan

data hasil pengamatan, penilaian, dan laporan pelaksanaan pembinaan dari pembina permasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.

Dalam hal terdapat narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus. Tidak memungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan narapidana yang bersangkutan adalah residivis, pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan “pembinaan khusus” meliputi perlakuan, pengawasan, dan pengamanan yang lebih bersifat maksimum sekuriti.

B. Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan

1. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Romli Atmasasmita, Rumah Penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:⁶

- a. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat
- b. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya

⁶Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982).

melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan Ham, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 tahun 1985 dalam pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:⁷

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat

⁷Fadli Pramananda, *Pemenuhan hak Mengembangkan Diri bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar*, Skripsi, (Makassar: Perpustakaan FH-UH, 2011), hal.14.

kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Ham RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.⁸

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa: Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan,

⁸Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.

Sehingga maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang tidak hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada bagaimana membina agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik.

Ide Pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan sebagai berikut:⁹

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.

Istilah “Pemasyarakatan” ini mengandung tujuan tertentu yaitu adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya nanti dapat kembali kemasyarakat sebagai anggota

⁹R.A. Koesnan, Politik Penjara Nasional, (Bandung: Sumur Bandung, 1961), h. 8.

masyarakat yang berguna. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

C. Hak-Hak Narapidana

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan.

Ketidakmampuan aparat penegak hukum, (khususnya pemasyarakatan) dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (khususnya para pelanggar hukum) mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara atau terjadinya pengabaian (*by omission*) terhadap hak konstitusional

warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.

Pasal 28 I menyatakan:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun juga dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- (3) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan peundang-undangan.

Berdasarkan prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa:

“setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”

Berkaitan dengan hal-hal diatas, peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian, maka dengan pengondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan. Karena suksesnya sistem ini sangat ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana melalui social participation, social support, dan social control. Dalam paham re-integrasi sosial Menurut Purnomo, dikatakan bahwa :¹⁰

Tindakan institusionalisasi akan potensial (cenderung) menimbulkan bahaya prosonisasi (yakni terkontaminasinya mental penghuni dengan budaya penjara), stigmatisasi (proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder); dan keduanya pada gilirannya akan menumbuhkan residivisme (pengulangan perilaku jahat).

Nilai historis tentang hak asasi narapidana terdahulu, dimana narapidana sering mendapatkan perlakuan yang melanggar hak dasar sebagai manusia karena diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karena itu atas kondisi penjara dan tahanan tersebut, pada tanggal 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya yang dikenal sebagai

¹⁰Dwidja Priyanto, *Loc. Cit.*

Konvensi Anti Penyiksaan, dimana pada saat itu Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada 1998.¹¹ Inti dari Konvensi Anti Penyiksaan tersebut melarang penyiksaan tahanan dan narapidana, disamping menyerukan penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan merendahkan martabat. Namun juga menegaskan bahwa penyiksaan, apalagi pembunuhan, terhadap tahanan atau narapidana merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia terhadap instrumen-instrumen hak asasi internasional juga menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan.

Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apapun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Palang Merah Internasional, ataupun Lembaga-Lembaga Swadaya masyarakat.

Adapun hak-hak narapidana selama menjalani sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut :¹²

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

¹¹ Fadli Pramananda, *op.cit.*, hal. 7.

¹² Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Makanan

1) Pengertian Makanan

Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai

penyakit.¹³

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan dimanapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Tanpa adanya makanan dan minuman, manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya. Adapun pengertian makanan menurut WHO (*World Health Organization*) yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan.¹⁴

Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya :

1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki.
2. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya.
3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan.
4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang diantarkan oleh makanan (*food borne illness*).

¹³Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2003).

¹⁴<http://www.putraprabu.wordpress.com>, pada tanggal 6 Mei 2014.

E. Mekanisme Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan

Penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dilaksanakan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah tersedianya taksiran belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan WBP dan tahanan sesuai standar. Perencanaan anggaran dimulai usulan Lapas/Rutan melalui Kanwil Dephuk dan HAM, dan selanjutnya diputuskan oleh Sekretariat Jenderal Dephuk dan HAM.

2. Perencanaan Menu

Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi WBP dan tahanan. Tujuan perencanaan menu adalah tersedianya siklus menu sesuai klasifikasi pelayanan yang ada di Lapas/Rutan dalam kurun waktu tertentu. Pada penyusunan menu dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi antara lain standar porsi dan peraturan pemberian makanan. Penyusunan menu dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebiasaan makan dan ketersediaan bahan makanan di daerah.

3. Pehitungan Kebutuhan Bahan Makanan

Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan sesuai menu yang ditetapkan dan jumlah WBP dan tahanan, dengan tujuan untuk tercapainya usulan dan kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan tahanan selama satu tahun.

4. Pengadaan Bahan Makanan

Proses pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.

5. Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Makanan

Pemesanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah WBP dan tahanan. Tujuan pemesanan adalah tersedianya pesanan sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan.

Pemeriksaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.

Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan.

6. Persiapan, Pengolahan Bahan Makanan dan Pendistribusian Makanan.

Persiapan bahan makanan adalah rangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara lain, membersihkan, memotong, mengupas, menggiling, mencuci dan merendam bahan makanan yang diolah.

Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, mengukus, dll sesuai teknik memasak yang diperlukan. Tujuan pengolahan bahan makanan adalah untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keempukan dan bebas dari organisme berbahaya untuk tubuh.

Pendistribusian makanan adalah kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah WBP dan tahanan yang dilayani dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Tujuan pendistribusian makanan adalah agar WBP dan tahanan mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

7. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan adalah mencatat tiap langkah kegiatan dalam penyelenggaraan makanan sedangkan pelaporan adalah hasil pengolahan dari pencatatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan. Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan sebagai alat perekam dan pemantau dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan makanan. Pencatatan dan pelaporan antara

lain mencakup penerimaan, pemakaian, stok/sisa yang belum terpakai, dan lain-lain yang dianggap perlu. Pencatatan dilakukan setiap hari, yang dilaporkan dilakukan secara berkala dan berjenjang.

8. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti dan mengetahui perkembangan setiap proses kegiatan secara terus-menerus baik langsung maupun tidak langsung.

Evaluasi adalah kegiatan penilaian oleh Kalapas/Karutan terhadap penyelenggara makanan sejak perencanaan sampai pendistribusiannya secara rutin dan berkala.

F. Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh Pemerintah. Di samping itu kesehatan juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat negara tersebut di samping ekonomi dan sosial.

Pelayanan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan maupun kelompok atau kelompok masyarakat secara keseluruhan. Abdul Bari Syaifudin yang menyatakan bahwa ;¹⁵

¹⁵ Abdul Bari Syaifudin, 2002. *Buku acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, hal. 17.

“Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat”.

Dari pengertian pelayanan kesehatan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, bentuk dan jenis pelayanan kesehatan mengandung banyak ragamnya, oleh karenanya sangat ditentukan oleh .¹⁶

1. Pengorganisasian pelayanan, apakah diselenggarakan secara mandiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi;
2. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya;
3. Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara keseluruhan.

2. Pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana adalah sebagai seorang manusia yang merupakan bagian dari masyarakat umum, oleh karena itu sebahagian keemerdekaannya terenggut sebagai wujud sanksi atas pelecehan norma hukum yang dilakukan dan mempunyai hak yang sama dengan manusia. Narapidana atau Wargabinaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang

¹⁶Azrul Anwar, 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta, hal. 36.

Maha Esa perlu dijaga harkat dan martabatnya, dihormati tanpa melecehkan hak-hak asasinya.

Narapidana juga berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi dan layak dikonsumsi agar kesehatannya dapat terjaga dengan baik.

Dalam peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana yang disepakati oleh kongres pertama PBB di Jenewa tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusinya tanggal 31 Juli 1975 dan tanggal 13 Mei 1977 menyebutkan bahwa pelayanan narapidana adalah perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum di penjara atau tindakan yang serupa tujuannya haruslah sejauh mana hukumnya mengizinkan, untuk menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas.

Pelayanan narapidana pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsionalnya sebagai penegak hukum. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat ditentukan dengan pelayanannya.

Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan adalah :

1. Pelayanan Umum. Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas tersebut, diperlukan tersedianya : Ketenagaan, Peralatan, Tempat/ruang pelayanan kesehatan, Obatobatan, Ruang lingkup pelayanan.
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan professional kepada penderita narapidana. Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS, Jiwa, dan Wanita hamil/melahirkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di Lapas maka pengadaan tenaga medis dan para medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.

3. Konsepsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Narapidana

Pengertian terhadap pelayanan minimal belum banyak dipahami secara luas oleh masyarakat. Pemahaman standar pelayanan minimal secara memadai bagi masyarakat merupakan hal yang signifikan karena berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, berupa tersedianya pelayanan yang harus dilaksanakan

pemerintah kepada masyarakat. Dengan dikeluarkannya surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor .100I7S7|OTDA dan Penggunaan standar pelayanan minimal agar masing-masing institusi pemerintah memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman serta tindak lanjut dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal. Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100I757IOTDA tanggal 8 Juli 2002, dirumuskan bahwa standar pelayanan minimal adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Standar pelayanan minimal harus mampu menjalin terwujudnya hak-hak individu serta menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai patokan dan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.03.PP.02.10 tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lapas sebagai berikut :

1. Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.
2. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lapas.
3. Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistimatis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kab. Gowa, dengan fokus studi pada Lapas Bolangi Sungguminasa. Penulis melakukan penelitian di Sungguminasa dengan dasar pertimbangan bahwa di Sungguminasa, Penulis dapat mengumpulkan data sehubungan dengan objek yang diteliti oleh Penulis.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

2) Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian,
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji
3. Daftar pertanyaan (kuisisioner), yaitu dengan memberikan rangkaian pertanyaan tentang hal yang berkenaan dengan penelitian penulis dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan ini disampaikan dalam bentuk tertulis.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara

kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Klas II A Sungguminasa

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan 13 Unit Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika (Salah Satunya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa).

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa berkapasitas 368 orang dengan penghuni saat ini berjumlah 520 orang (per tanggal 7 Mei 2014), terletak di jalan Lembaga desa Timbuseng kecamatan Pattalasang kabupaten Gowa. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa berdiri diatas tanah seluas 158 x 80.5 meter persegi, dengan luas tembok keliling 110 x 80,5 meter persegi, dibangun dalam empat tahap mulai tahun 2003 sampai tahun 2006. Mulai beroperasi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sejak tanggal 2 Agustus 2007. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa didesain sedemikian rupa dengan tetap mempertimbangkan segi keamanan dan pembinaan dan mencoba menggunakan pendekatan mengarah rehabilitasi yang berkombinasi dengan protap. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan terdiri atas ruang perkantoran, gedung blok / kamar hunian yang terdiri atas:

- Blok A bawah dan Blok A atas
- Blok B bawah dan Blok B Atas
- Blok C1 bawah dan Blok C Atas
- Klinik, gereja, aula, ruang kegiatan kerja, masjid dan dapur.

Adapun visi, misi, tujuan, fungsi dan sasaran dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa adalah sebagai berikut :

VISI: Terwujudnya insan petugas pemasyarakatan dan WBP yang bebas HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba.

MISI:

- 1) Melaksanakan perawatan kesehatan;
- 2) Melaksanakan bimbingan rohani dan hokum;
- 3) Melaksanakan pelayanan rohani dan rehabilitasi social;
- 4) Membangun Kemitraan;

TUJUAN:

- 1) Meningkatkan penegakan Hukum;
- 2) Pembentukan mental jasmani/rohani WBP;
- 3) Mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS;
- 4) Meningkatkan kualitas hidup Odha;
- 5) Mengembangkan metode treatment, terapy rehabilitasi dan security narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa;

FUNGSI:

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkoba;

- 2) Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana/anak didik kasus narkoba;
- 3) Melakukan bimbingan social/kerohanian;
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan tata tertib dan urusan tata usaha dan rumah tangga.

SASARAN

(UMUM):

- 1) Meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Meningkatkan kualitas intelektual
- 3) Meningkatkan kualitas sikap dan perilaku
- 4) Meningkatnya kualitas profesionalisme
- 5) Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani

SASARAN

(KHUSUS):

- 1) Isi Lembaga Pemasyarakatan ideal dengan kapasitas
- 2) Angka pelarian dan gangguan kamtib minim (bahkan tidak ada)
- 3) Menurunnya jumlah residivis.
- 4) Persentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan dimasyarakat.
- 5) Jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya meningkat.
- 6) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia.
- 7) Lembaga Pemasyarakatan selalu dalam kondisi bersih dan terpelihara.
- 8) Pembinaan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat umum.

B. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Lapas Klas II A Sungguminasa

Narapidana sebagai salah satu komunitas kecil dari masyarakat termarginal, patut mendapat perhatian. Perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan/dipenjara seharusnya tidak ditekankan pada pemisahan mereka dari masyarakat, akan tetapi dengan meneruskan peran mereka sebagai bagian masyarakat. Petugas pemasyarakatan seharusnya dapat memberikan pelayanan yang sesuai hukum dalam arti dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak yang bertalian dengan kepentingan narapidana. Salah satu hak yang dimiliki narapidana adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I:
Data jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa

No	Tahun	Jumlah Penghuni Warga Binaan	Daya Tampung	Kelebihan Daya Tampung
1	2012	596	368	228
2	2013	602	368	234
3	2014	496 (per 3 November 2014)	368	128

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa 2014

Berdasarkan data dari tabel diatas jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas IIA Sungguminasa saat ini sudah melebihi kapasitas lapas tersebut yang hanya bisa menampung 368 Narapidana. Situasi tersebut sangat memprihantinkan terkait hal tersebut bisa sangat berpengaruh akan proses berjalannya pemenuhan hak – hak kepada para narapidana di Lapas Klas IIA Sungguminasa.

1. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.03.PP.02.10 Tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lapas sebagai berikut:

1. Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama
2. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lapas.
3. Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistimatis.

Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa terdapat poliklinik sebagai tempat perawatan bagi para WBP yang sedang menderita penyakit, dalam wawancara dengan Pak Andi selaku

perawat di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa terdapat seorang dokter dan 3 orang perawat untuk melayani sekitar 496 warga binaan. Dokter Lapas hanya terbatas pada dokter umum.

Fasilitas penunjang layanan kesehatan pada Lapas Sungguminasa dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel II:
Pelayanan Kesehatan**

No.	Jenis Pelayanan	Ada	Tidak Ada	Jumlah	Keterangan
1	Poliklinik	✓		1	<i>Dokter Umum</i>
2	Dokter Lapas	✓		1	
3	Perawat Lapas	✓		3	
4	Alat Medis	✓		3	
5	Obat- Obatan	✓			
6	Ruang Rawat		✓		

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa 2014

Praktek dokter di Lapas Sungguminasa sebenarnya dilakukan setiap hari, tetapi karena kendala pekerjaan , dokter Lapas sangat jarang melakukan tugasnya di Lapas dan hanya dapat melayani warga binaan di akhir pekan saja, terkadang penanganan kesehatan kepada warga binaan yang sakit hanya sekedar kordinasi jarak jauh antara dokter dan perawat. Kondisi ini tentu merugikan narapidana karena pentingnya dokter ditugaskan disuatu Lapas, karena seorang dokter dapat menentukan pengobatan yang tepat terhadap narapidana yang sedang sakit setelah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana tersebut., Sementara perawatnya bertugas setiap hari dan jadwal tugas

jaga para perawat dibagi berdasarkan pembagian shift kerja. Sama halnya dengan dokter, pentingnya keberadaan perawat di Lapas karena perawat harus terlebih dahulu mencari tahu apa yang salah dengan narapidana tersebut, baru kemudian dapat menentukan perlakuan apa yang tepat untuknya. Dengan demikian kegiatan pelayanan kesehatan akan dapat terlaksana dengan baik. Ketersediaan dokter dan perawat di Lapas Sungguminasa belum cukup memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap para warga binaan terkait tidak sebandingnya jumlah narapidana yang berkisar 496 orang dengan jumlah tenaga medis yang ditugaskan yaitu hanya 4 orang.

Menurut pak Andi, keluhan penyakit yang sering diderita oleh narapidana yaitu furunkel (bisul) dan diare. Menurutnya, banyak narapidana yang menderita penyakit furunkel berkaitan dengan over capacity yang sedang terjadi di Lapas Sungguminasa, hal itu membuat jumlah penghuni setiap kamar juga mengalami kelebihan kapasitas yang dimana satu kamar hanya bisa menampung 5 narapidana terpaksa harus dihuni hingga 8 - 10 narapidana. Situasi itulah yang menyebabkan kurang terjaganya kebersihan setiap kamar sehingga banyak narapidana rentan terjangkit suatu penyakit dan juga meningkatkan resiko penularan penyakit bagi setiap penghuni Lapas. Selanjutnya menurut pak Andi, narapidana juga banyak yang menderita penyakit diare karena kurang baiknya kualitas makanan yang diberikan, selain itu kurang terjaganya kebersihan kamar hunian para narapidana juga menjadi penyebab rentannya narapidana terjangkit penyakit diare.

Bilamana poliklinik tersedia di dalam suatu lembaga, maka peralatan, peralatan dan pasokan obat-obatan harus mencukupi untuk melakukan perawatan medis dan merawat narapidana yang sakit. Di klinik Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa disediakan stok obat – obatan sebagai bentuk perawatan awal apabila ada narapidana yang sakit, di Lapas Sungguminasa proses pengadaan obat – obatan disiapkan berdasarkan jenis penyakit yang sering diderita para Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam hal ini obat untuk penyakit diare dan furunkel (bisul) akan disediakan lebih banyak oleh pihak Lapas karena banyaknya jumlah narapidana yang menderita penyakit tersebut. Terdapat juga berbagai macam jenis obat – obatan generic sebagai langkah awal pertolongan pertama bagi narapidana yang menderita penyakit. Fasilitas medis seperti tongkat, kursi roda dll. Juga disediakan untuk membantu proses pemulihan para narapidana. Di Lapas Sungguminasa disiapkan juga satu unit ambulance apabila ada narapidana yang butuh rujukan kerumah sakit untuk perawatan yang lebih intensif.

Di Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa tidak dilakukan pengecekan kesehatan yang rutin bagi setiap warga binaan terkait terlalu banyaknya jumlah narapidana yang menghuni Lapas disertai minimnya petugas kesehatan yang ada. Program pemberian vitamin secara rutin kepada setiap narapidana juga belum bisa dilaksanakan oleh pihak lapas karena terkendala masalah anggaran yang belum memadai. Padahal vitamin sangat penting untuk kesehatan fisik narapidana agar tidak

mudah terserang suatu penyakit. Namun sebagai upaya pencegahan terserang dan penyebaran penyakit perawat lapas setiap saat akan tetap melakukan pemantauan kesehatan kepada para narapidana

Bagi narapidana yang diduga terjangkit penyakit infeksi atau menular, pihak Lapas masih mengalami kendala yaitu tidak adanya fasilitas ruang rawat di klinik Lapas Sungguminas apabila terjadi kondisi tersebut. Penanganan bagi yang membutuhkan perawatan khusus dilakukan di dalam ruang klinik yang berfungsi ganda sebagai ruang pemeriksaan yang hanya memiliki 2 tempat tidur. Selain itu, belum adanya tenaga medis yang ahli yang dapat menangani penyakit – penyakit yang membutuhkan perawatan yang lebih spesifik, perawatan yang diberikan perawat lapas hanya bersifat pertolongan pertama. Apabila seorang narapidana mengalami penyakit yang butuh perawatan khusus namun petugas kesehatan dan stok obat – obatan yang ada belum bisa mengobati narapidana tersebut maka narapidana tersebut dengan mengikuti prosedur tetap akan dirujuk ke rumah sakit dengan pengawasan penuh dari pihak lembaga pemasyarakatan.

Penulis melakukan pengamatan di klinik Lapas dan menemukan data para warga binaan yang berobat per 3 – 5 November 2014, data warga binaan yang berobat dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel III
Daftar WBP yang dirawat di Poliklinik 3 - 5 November 2014

NO	Nama Pasien	Tgl. Masuk	Diagnosa
1	A. Sapta Hadi	19 Nov 2014	Furunkel
2	Luther	19 Nov 2014	Furunkel
3	Ali Imran	19 Nov 2014	Demam
4	Bahrin	19 Nov 2014	Diare
5	Wahyudin	19 Nov 2014	Asma
6	Syamsuddin	19 Nov 2014	Diare
7	Bobby Gosari	19 Nov 2014	Furunkel
8	Ilham Hapsi	19 Nov 2014	Diare

Sumber data : Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa

Penulis juga melakukan wawancara dengan saudara Darwis Wijaya, salah satu penghuni Lapas Sungguminasa, Darwis adalah narapidana yang menderita penyakit asma. Menurutny, proses pelayanan kesehatan di poliklinik Lapas Sungguminasa belum berjalan cukup baik, karena masih lambannya penanganan pihak lapas dalam melakukan pengobatan apabila penyakitnya tiba-tiba kambuh. Untuk mengklarifikasi pernyataan saudara Darwis, penulis melakukan kuesioner pada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa terkait pemenuhan hak mereka mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel IV
Data Hasil Pengolahan Kuesioner

No.	Perihal	Jawaban		
		Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Perawatan kesehatan oleh petugas kesehatan	7	19	24
2	Kelengkapan obat – obatan dan peralatan medis yang Disediakan	5	14	31
3	Pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan	7	14	29

Sumber Data : Narapidana melalui pembagian kuisisioner

Berdasarkan tabel diatas untuk proses perawatan kesehatan oleh petugas Lapas, 7 responden mengatakan perawatan yang dilakukan di poliklinik Lapas sudah sangat baik, 19 responden mengatakan mereka dirawat dengan cukup baik, dan 24 orang para petugas kesehatan masih kurang baik dalam melakukan tugas mereka. Sementara untuk kelengkapan obat – obatan dan peralatan medis 5 responden mengatakan obat – obatan beserta peralatan medis yang disediakan sudah sangat lengkap, 14 responden mengatakan cukup lengkap dan 31 responden mengatakan obat - obatan beserta peralatan medis yang ada masih belum lengkap. Dari jawaban responden menyangkut pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lapas Sungguminasa, dimana dari 50 responden sebanyak 7 orang mengatakan bahwa pelayanan kesehatan sudah berjalan sangat baik, kemudian disusul

dengan jawaban responden yang mengatakan pelayanan kesehatan sudah berjalan cukup baik dengan jumlah 14 orang responden, sedangkan sebanyak 29 orang mengatakan bahwa pemenuhan hak mereka akan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa masih kurang baik. Hal ini diakibatkan banyak hal, salah satunya adalah karena terkadang tidak adanya persediaan obat-obatan yang diminta oleh narapidana yang menderita penyakit tertentu. Maka pemberian obat-obatan kepada narapidana yang datang dengan keluhan sakit tertentu tidaklah diberikan obat yang dia diperlukan atau sesuai dengan indikasi spesifik dari penyakitnya, sehingga yang terjadi adalah kesembuhan yang diharapkan terjadi tidak dapat dicapai dengan maksimal.

Terkait Lapas Sungguminasa adalah lembaga pemasyarakatan yang khusus membina para narapidana kasus narkoba, maka di Lapas Sungguminasa biasa ditemukan salah seorang narapidana yang tiba-tiba mengalami sakau, yaitu gejala-gejala penyakit yang timbul akibat ketergantungan akan penggunaan zat-zat yang terkandung dalam narkoba. Bentuk penanganan yang dilakukan petugas kesehatan adalah dilakukan detoksifikasi kepada narapidana tersebut yaitu upaya mengeluarkan racun atau zat-zat yang dihasilkan narkoba yang masih tertinggal dalam tubuh narapidana sebagai bentuk pertolongan pertama yang diterima oleh narapidana tersebut. Setelah itu akan dilakukan upaya stabilisasi guna memulihkan narapidana tersebut yaitu dengan memberikan pengobatan sesuai dengan gejala-gejala yang timbul.

Di Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa tidak memiliki tenaga psikolog, akan tetapi sering dilakukan penyuluhan bertemakan narkoba ataupun mengenai kesehatan yang dilakukan atas kerjasama dengan ormas beserta dinas – dinas terkait guna meningkatkan kesadaran hukum para narapidana dan juga mengajarkan para narapidana akan pentingnya kesehatan sekaligus sebagai upaya memotivasi narapidana agar dapat melanjutkan hidup dengan baik apabila sudah bebas kelak.

Di Lapas Sungguminasa juga disediakan fasilitas lapangan olahraga yang dapat digunakan narapidana untuk melakukan berbagai kegiatan seperti senam, bermain sepak bola, dan berbagai macam jenis olahraga lainnya guna menunjang kesehatan jasmani para penghuni Lapas.

Berdasarkan data diatas penulis berkesimpulan bahwa pemenuhan hak di lembaga pemasyarakatan sungguminasa dalam hal pemberian pelayanan kesehatan tidak berjalan baik karena belum memenuhi konsepsi standar minimal pelayanan kesehatan bagi narapidana, Hal ini dibuktikan dengan:

- Perawatan oleh petugas kesehatan kepada para WBP yang sedang menderita penyakit belum dilakukan secara sistematis karena kendala anggaran.
- Fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta obat – obatan yang belum cukup memadai untuk menunjang kesehatan para warga binaan.

- Jumlah petugas kesehatan yang ditugaskan di Lembaga Pemasyarakatan tidak cukup banyak untuk menangani narapidana terkait kondisi Lapas yang jumlah warga binaannya sudah melebihi kapasitas Lapas.
- Belum ditemukannya petugas kesehatan yang ahli dalam menangani narapidana yang sedang menderita penyakit yang membutuhkan perawatan yang lebih intensif.
- Tidak maksimalnya peran seorang dokter Lapas dalam menangani para narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bagi para narapidana.

2. Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Lapas Klas II A Sungguminasa

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu hak yang dimiliki ialah hak mendapatkan makanan yang layak, salah satu indikator ketercapaian pemenuhan makanan yang layak harus sesuai dengan menu makanan yang disediakan, di lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa menu makanan yang dihidangkan disesuaikan dengan Kepmen Hukum dan HAM RI nomor: M.HM-01.PK.07.2 tahun 2009. Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa makanan yang dihidangkan kepada para narapidana dicantumkan di dapur Lapas, daftar menu yang disediakan

terhitung per 10 hari dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V
Daftar Menu 10 Hari Lapas Narkotika
Klas IIA Sungguminasa

Hari	Pagi	Snack	Siang	Malam
I	Nasi,tempe goreng, tumis kacang panjang	Bubur kacang ijo	Nasi,telur balado, sayur asem, pisang,air putih	Nasi, tempe bacem, urap sayur, air putih.
II	Nasi, oseng tempe, tumis sawi putih air putih	Ubi rebus	Nasi, ikan segar goreng, pecel sayur, air putih	Nasi, ikan asin goreng, sayur kare, air putih
III	Nasi Telor rebus, oseng taughe, air putih	Bubur kacang ijo	Nasi, daging goreng gepuk, Sup sayuran, pisang, air putih	Nasi, Tempe goreng tepung, tumis kangkung, air putih
IV	Nasi, tempe goreng, oseng buncis, air putih	Ubi rebus	Nasi, telur bumbu, semur, sup lodeh, air putih.	Nasi, kacang tanah balado, asem-asem buncis, air putih
V	Nasi, tempe bumbu kuning, tumis labu siem kacang panjang, air putih	Bubur kacang ijo	Nasi, daging rendang, sayur asem, pisang, air putih	Nasi, oseng tempe, sup sayur, air putih
VI	Nasi, tempe bacem, tumis kangkung, air putih	Ubi rebus	Nasi, telur asin, sayur kare, air putih	Nasi, ikan asin goreng, Urap sayur, air putih
VII	Nasi, Tempe goreng, cah wortel col, air putih	Bubur kacang ijo	Nasi, ikan segar goreng, sayur bening, bayam + jagung, pisang, air putih	Nasi, tempe balado, sayur asam, air putih
VIII	Nasi, telur asin, oseng sawi, air putih	Ubi rebus	Nasi, soto daging, cap cae/col+wortel, air putih	Nasi, pecel sayuran, Air putih

IX	Nasi, oseng tempe, tumis terong, air putih	Bubur kacang ijo	Nasi, ikan asin goreng, tumis kangkung, pisang, air putih	Nasi, oseng tempe, sayur lodeh, air putih
----	--	---------------------	--	--

Sumber Data : Dapur Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa

Makanan dapat dikatakan layak dikonsumsi apabila makanan tersebut memenuhi kebutuhan gizi harian para narapidana, higienis dan bebas dari kontaminasi yang dapat menyebabkan berubahnya makanan tersebut menjadi media bagi suatu penyakit. Dilihat dari daftar menu yang disediakan di Lapas, penulis berpendapat bahwa makanan yang dihidangkan di Lapas masih belum layak untuk memenuhi kebutuhan gizi harian para narapidana karena masih terdapat beberapa kekurangan jenis – jenis bahan makanan yang dicantumkan. Hal itu dibuktikan dengan masih kurangnya buah – buahan sebagai sumber vitamin yang dicantumkan di menu harian Lapas. Buah – buahan diberikan kepada para narapidana hanya sekali dalam kurun waktu per dua hari, itupun hanya buah jenis pisang tanpa ada jenis buah – buahan lain yang disediakan pihak Lapas. Bukan itu saja, jenis daging yang diberikan juga tidak beragam, kebutuhan akan makanan berbahan dasar daging sangat penting untuk narapidana karena mengandung zat gizi (lemak, protein, karbohidrat, mineral dan vitamin) yang dibutuhkan tubuh dalam melakukan aktifitas sehari – hari. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya ahli gizi yang ditugaskan di Lapas guna menilai apakah makanan yang dihidangkan sudah memenuhi standarisasi gizi harian para narapidana atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 6 November 2014 dengan Pak Habibi selaku Pengawas dapur di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa mengungkapkan walaupun jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa saat ini sudah melebihi kapasitas lapas namun pemenuhan hak untuk makanan kepada para warga binaan tetap dilakukan berdasarkan apa yang menjadi hak narapidana di Lapas Sungguminasa, para narapidana akan diberi makan tiga kali sehari dan pengolahan makanan disesuaikan dengan menu harian yang tercantum di dapur Lapas. Menurut pak Habibi, mengenai pengadaan bahan makanan pihak lapas memesan bahan makanan berdasarkan kebutuhan para warga binaan setelah itu bahan makanan mentah yang diterima akan disimpan untuk diolah sesuai dengan daftar menu harian dan jumlah narapidana di Lapas.

Selanjutnya penulis melakukan pengamatan pada dapur di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa, di dapur Lapas penyimpanan bahan makanan terkendala pada fasilitas penyimpanan bahan makanan yang belum memadai karena bahan makanan hanya disimpan di sebuah gudang yang membuat bahan makanan mudah rusak dan rentan dengan terjadinya pencemaran.

Terkait kebersihan peralatan makan para narapidana seperti ompreng (piring), sendok dan gelas sudah dirawat dengan cukup baik karena para narapidana akan ditugaskan secara bergiliran untuk membersihkan peralatan makan baik sebelum dan ataupun setelah jam makan Lapas Sungguminasa. Untuk proses pengolahan

makanan beberapa narapidana ditugaskan mengolah bahan makanan mentah yaitu membersihkan, mengupas, memotong, mencuci dan merendam bahan makanan sebelum dimasak.

Terkait proses pengolahan makanan, di dapur Lapas tidak ditemukan adanya juru masak / koki tetapi secara bergiliran para narapidana akan diberi tugas secara kelompok untuk memasak bahan makanan yang disediakan berdasarkan daftar menu yang sudah dicantumkan, para narapidana yang ditugaskan memasak dipilih oleh pihak lapas berdasarkan pengalaman mereka dalam proses pengelolaan makanan.

Pada kesempatan yang sama penulis juga mewawancarai salah satu narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa bernama Muhammad Yunus (39 Tahun) terkait pemenuhan haknya dalam mendapatkan makanan yang layak, beliau mengemukakan bahwa proses pengelolaan makanan belum dilakukan dengan baik, hal itu terkadang membuat banyak narapidana mengalami menderita sakit perut setelah mengonsumsi makanan yang diberikan karena kurang bersihnya bahan makanan yang ada ditambah makanan diolah bukan oleh yang memang ahli dalam pengolahan makanan.

Untuk melakukan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut diatas penulis melakukan kuesioner pada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar terkait pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak.

Tabel VI
Data hasil pengolahan kuesioner

No.	Perihal	Jawaban		
		Layak	Kurang Layak	Tidak Layak
1	Pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak	13	26	11
2	Proses pengelolaan Makanan	10	29	11
3	Menu makanan yang Disediakan per 10 hari	20	21	9
4	Kebersihan alat makan dan makanan yang disediakan	12	28	10
5	Porsi makanan yang diberikan	12	25	13

Sumber Data : Narapidana melalui pembagian kuisisioner

Berdasarkan data yang diambil dari sebanyak 50 Narapidana yang menjadi responden, dapat dilihat bahwa terkait pemenuhan hak mereka untuk mendapatkan makanan yang layak 13 responden mengatakan makanan yang diberikan sudah layak, 26 responden mengatakan kurang makanan kurang layak dan 11 responden mengatakan pelayanan makanan di Lapas Sungguminasa tidak memenuhi standar untuk bisa dikatakan layak. Terkait proses pengelolaan makanan 10 responden mengatakan makanan sudah diolah dengan baik, 29 responden mengatakan proses pengolahan masih kurang baik dan 11 responden mengatakan tidak layak. Selanjutnya mengenai menu makanan yang disediakan per-sepuluh hari 20 responden mengatakan menu yang disediakan sudah layak, 21 responden mengatakan kurang layak dan 9 responden mengatakan tidak layak. Terkait kebersihan alat makan dan makanan yang disediakan 12 responden mengatakan alat makan dan

makanan yang diberikan sudah bersih, 28 narapidana mengatakan masih kurang bersih dan 10 responden mengatakan alat makan beserta makanan yang disajikan di Lapas Sungguminasa kotor dan tidak layak untuk dikonsumsi. Mengenai jumlah porsi makanan yang diberikan 12 responden mengatakan makanan yang disajikan sudah mencukupi, 25 responden mengatakan kurang mencukupi dan 13 narapidana mengatakan porsi makanan yang disajikan belum mencukupi kebutuhan harian narapidana.

Selain kuesioner diatas penulis juga melakukan wawancara langsung dengan narapidana lainnya mengenai keluhan mereka terkait pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak. Hasil wawancara tersebut penulis rangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel VII:
Data terkait hasil wawancara dengan narapidana

No.	Nama Narapidana	Keluhan
1.	Suardi Bin Jafar	Porsi makanan diperbanyak
2.	Ricky Rudi	Perbanyak jenis buah
3.	Sudirman	Agar menambahkan roti di menu Lapas
4.	Irwan bin Dg Sutte	Diberikan susu setiap pagi
5.	Andy Prajitno	Pembagian makanan di ompreng dilakukan lebih merata
6.	Habibi Ali	Lebih baik lagi cara masaknya
7	Luter	Memenuhi 4 sehat 5 sempurna
8	Amir	Daging disediakan setiap hari
9	Syarifuddin	Buah lebih sering diberikan dan lebih bervariasi
10	Haedir Syam	Ditambahkan ayam di menu lapas
11	Ismail	Susu agar lebih rutin diberikan setiap hari
12	Dhani Bonto	Lebih bersih lagi cara olah makanannya
13	Steven	Ditugaskan juru masak yang bagus

14	Ainul Yaqin	Makanan dijaga kebersihannya
15	Arifuddin	Cara mengolah makanan harus lebih baik dan lebih bersih lagi
16	Hilmi	Jatah makanan diperbanyak
17	Suardi Ibar	Terkadang masih kurang buah-buahan yang diberikan
18	Hengki	Lebih baik lagi cara masakannya
19	Rahmat Amin	Ayam dan daging ditambahkan di menu
20	Muliakir	Makanannya diolah lebih baik lagi

Sumber Data : Wawancara langsung dengan narapidana

Berdasarkan pengamatan dan data – data yang dirangkum penulis diatas, penulis berkesimpulan bahwa pemenuhan hak narapidana dalam hal mendapatkan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan :

1. Menu makananan yang disediakan pihak Lapas belum memenuhi kriteria untuk bisa dikatakan makanan yang layak karena masih terdapat beberapa kekurangan terkait kebutuhan gizi harian para narapidana
2. Pemenuhan hak narapidana belum sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan pemberian makanan kepada narapidana karena anggaran dana yang masih terbatas.
3. Fasilitas penyimpanan bahan makanan yang belum memadai karena bahan makanan disimpan di tempat yang belum memenuhi syarat, penyimpanan harus dilakukan dalam suatu tempat yang bebas dari berbagai gangguan yang dapat menyebabkan bahan makanan tersebut rusak dan bebas dari pencemaran yang dapat membuat bahan makanan tersebut menjadi sumber penyakit.
4. Makanan yang diberikan tidak higienis karena belum bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit sehingga

sering ada narapidana yang mengalami sakit perut setelah mengonsumsi makanan yang dihidangkan.

5. Masih kurang baiknya proses pengolahan makanan di dapur Lapas Sungguminasa karena tidak ditemukannya juru masak / koki yang ahli dalam mengolah makanan.
6. Tidak adanya ahli gizi yang ditugaskan untuk menilai standar gizi yang terkandung dalam makanan yang disajikan kepada para narapidana.

C. Kendala yang Dihadapi Pihak Lapas Dalam Melakukan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa

Dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa.

Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak adalah dua jenis hak yang harus dipenuhi pihak lapas sebagai penyelenggara program pembinaan, tetapi dalam proses pemenuhan kedua jenis hak tersebut masih ada beberapa kendala yang dihadapi, baik itu kendala yang dihadapi pihak lapas dalam melakukan pelayanan kesehatan ataupun kendala dalam proses pemberian makanan yang layak kepada narapidana.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa secara garis besar kendala

yang dihadapi pihak Lapas dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa adalah :

- Over capacity yang sedang terjadi di dalam Lapas Sungguminasa, Lapas yang diisi tidak sesuai kapasitasnya membuat proses berjalannya program pembinaan kepada narapidana menjadi tidak maksimal. Proses pembinaan akan berjalan baik apabila narapidana dapat menjalankan proses pembinaan dengan keadaan yang sehat fisik maupun mental. Dengan kondisi lapas tersebut tentulah sangat sulit untuk mencapai kondisi narapidana yang ideal untuk dibina karena kelebihan kapasitas membuat suasana Lapas menjadi tidak kondusif dan membuat banyak narapidana menjadi rentan terjangkit berbagai macam penyakit. Kurang terjaganya kebersihan Lapas juga menjadi salah satu yang diakibatkan oleh over capacity di Lapas Sungguminasa.
- Kurangnya petugas yang memiliki keahlian khusus untuk menangani para narapidana Di Lapas Sungguminasa . Di Lapas Sungguminasa masih kekurangan tenaga – tenaga yang ahli dalam memiliki keahlian khusus seperti tenaga psikolog untuk menunjang kesehatan psikis para narapidana terkait Lapas Sungguminasa adalah lapas yang khusus membina para narapidana yang terjerat kasus narkoba, masih kurangnya tenaga medis yang lebih ahli dan professional dalam melakukan perawatan kesehatan untuk narapidana yang menderita penyakit – penyakit yang memerlukan perawatan secara khusus

seperti penyakit HIV, Tuberkulosis, Bronkitis dll. Masih tidak adanya juru masak yang ahli dalam mengolah makanan mengakibatkan kurang baiknya kualitas makanan yang dihidangkan kepada para narapidana, ditambah lagi tidak adanya ahli gizi di Lapas seperti yang disebutkan dalam pedoman penyelenggaraan makanan di Lapas bahwa idealnya proses pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lapas harus melibatkan ahli gizi sebagai supervisor dalam proses pengolahan makanan dan juga bertugas untuk membantu proses pemenuhan gizi harian para narapidana

- Dana yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam memenuhi hak – hak narapidana karena dengan anggaran dana yang belum cukup membuat proses berjalannya program pembinaan tidak berjalan dengan baik. Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak – hak narapidana sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah selaku pelaksana program pembinaan. Hal itu dibuktikan dengan masih kurang lengkapnya fasilitas – fasilitas yang ada di Lapas Sungguminasa untuk menunjang kebutuhan – kebutuhan harian narapidana. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran agar proses pembinaan kepada para narapidana dapat berjalan dengan maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan langsung maupun wawancara yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa belum berjalan baik karena berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Lapas, kendala - kendala tersebut antara lain adalah over capacity yang terjadi di Lapas, masih kurangnya petugas yang ada di Lapas Sungguminasa dan juga pihak Lapas masih terkendala masalah anggaran dana yang terbatas. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai kendala yang dihadapi pihak lapas tersebut adalah :

- Tidak terpenuhinya kebutuhan gizi harian para narapidana karena kurang baiknya proses pengolahan makanan di dapur Lapas Sungguminasa dan fasilitas penyimpanan dan pengolahan bahan makanan yang belum memadai sehingga makanan yang disajikan tidak higienis.
- Perawatan oleh petugas kesehatan kepada para WBP yang sedang menderita penyakit belum dilakukan dengan baik dan fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta obat – obatan yang ada di klinik belum memadai untuk menunjang kesehatan para narapidana di Lapas Sungguminasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran mengenai pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak agar:

- Sebaiknya lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa di isi sesuai dengan jumlah kapasitasnya yaitu 368 orang agar proses pembinaan kepada para narapidana berjalan lebih efektif. Pihak Lapas juga perlu mempertimbangkan adanya upaya perluasan lahan/kawasan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa terkait over capacity yang sedang terjadi.
- Menambahkan jumlah petugas yang ada terkhusus pada tenaga medis seperti dokter, perawat dan psikolog agar proses pelayanan kesehatan berjalan lebih maksimal dan juga melakukan penambahan beberapa petugas yang ahli dalam proses pengolahan makanan seperti koki dan ahli gizi agar makanan yang diberikan kepada para narapidana memenuhi standar.
- Melakukan perencanaan anggaran untuk melengkapi fasilitas – fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan para narapidana seperti melakukan perbaikan pada tempat penyimpanan bahan makanan dengan menyediakan ruangan khusus yang bersih disertai dengan pengatur suhu agar bahan makanan yang ada tidak mudah rusak. Pihak Lapas juga perlu mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan

fasiltas kesehatan yang ada saat ini seperti menyediakan ruang rawat bagi narapidana dan melengkapi jenis obat – obatan yang disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdul Bari Syaifudin, 2002. *Buku acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta.

Azrul Anwar, 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Fadli Pramananda, 2011. *Pemenuhan hak Mengembangkan Diri bagi Narapidana Pada Lembaga Permayarakatan Klas I Kota Makassar*, Skripsi, (Makassar: Perpustakaan FH-UH)

R.A. Koesnan, 1961. *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung.

Notoatmodjo, 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta.

Romli Atsasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

David Zulkarnaen, 2009. *Pengembangan diri. Makalah Etika Profesi*, Yayasan Pendidikan Mandiri Bogor Educare, Bogor.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

REFERENSI LAIN :

<http://adtyadjavanet.blogspot.com/2013/11/elaksanaan-pelayanan-kesehatan.html>.

<http://www.putraprabu.wordpress.com>